

Partisipasi politik atau sekadar formalitas: Mengkritisi demokrasi modern di Indonesia

Shohibbul Bahri Annan

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: oeiariel@gmail.com

Kata Kunci:

Demokrasi; partisipasi politik; literasi politik; demokrasi deliberatif; politik uang.

Keywords:

Democracy; political participation; political literacy; deliberative democracy; money politics.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena partisipasi politik dalam demokrasi modern di Indonesia yang cenderung terjebak pada aspek prosedural dan formalitas. Tingginya angka partisipasi pemilih belum tentu mencerminkan kualitas demokrasi yang substansial apabila tidak disertai kesadaran kritis, pemahaman politik, dan tanggung jawab warga negara. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui analisis berbagai literatur, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan kajian akademik terkait demokrasi serta partisipasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi semu tampak dalam perilaku memilih tanpa memahami visi, misi, dan rekam jejak kandidat. Fenomena ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi politik,

dominasi media sosial yang menciptakan ruang gema, serta praktik politik uang yang membentuk pola hubungan transaksional antara pemilih dan kandidat. Dampak yang ditimbulkan ialah lahirnya demokrasi prosedural, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta melemahnya integritas pemerintahan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, diperlukan transformasi menuju demokrasi deliberatif melalui penguatan pendidikan politik, peningkatan literasi digital, dan revitalisasi budaya musyawarah dalam ruang publik. Dengan demikian, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari jumlah partisipan dalam pemilu, tetapi dari tingkat kesadaran masyarakat dalam menentukan pilihan politik yang rasional dan bertanggung jawab demi kemaslahatan bersama.

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of political participation in modern Indonesian democracy, which tends to be trapped in procedural and formalistic aspects. High voter turnout does not necessarily reflect substantive democratic quality when it is not accompanied by critical awareness, political understanding, and civic responsibility. This research employs a qualitative method with a literature study approach by analyzing various references, scientific journals, official documents, and academic studies related to democracy and political participation. The findings reveal that pseudo-participation appears in voting behavior without understanding candidates' visions, missions, and track records. This phenomenon is influenced by low political literacy, the dominance of social media that creates echo chambers, and money politics that fosters transactional relationships between voters and candidates. The resulting impacts include the emergence of procedural democracy, declining public trust in state institutions, and weakening governmental integrity. To address these issues, transformation toward deliberative democracy is required through strengthening political education, improving digital literacy, and revitalizing the culture of deliberation in the public sphere. Therefore, democratic quality should not only be measured by the number of participants in elections, but also by the level of citizens' awareness in making rational and responsible political choices for the common good.



Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat. Dalam praktiknya, demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan negara. Namun, secara normatif, demokrasi bukan sekadar mekanisme teknis pemilihan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Zainuddin et al., 2010), demokrasi dalam perspektif yang lebih luas, termasuk dalam nilai-nilai Islam, harus berpijak pada prinsip keadilan (*'adl*), musyawarah (*syura*), dan persamaan hak. Tanpa nilai-nilai tersebut, partisipasi hanya akan menjadi prosedur teknis yang kehilangan ruh keadilannya.

Di Indonesia, tingginya angka partisipasi politik dalam pemilihan umum sering dijadikan indikator keberhasilan demokrasi. Akan tetapi, tingginya tingkat kehadiran pemilih belum tentu menunjukkan kualitas demokrasi yang sehat. Sebagian masyarakat masih berpartisipasi tanpa pemahaman yang memadai terhadap isu politik, visi-misi calon, maupun konsekuensi dari pilihan yang diambil. Kondisi ini memunculkan fenomena partisipasi semu, yakni keterlibatan masyarakat dalam proses politik yang bersifat formal, tetapi tidak didasarkan pada kesadaran kritis dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam konteks ini, partisipasi politik hanya berhenti pada penggunaan hak suara tanpa adanya keterlibatan substantif dalam mengawal kebijakan public (Hidayatullah, 2024).

Fenomena partisipasi semu termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti perilaku memilih berdasarkan popularitas kandidat, pengaruh media sosial, tekanan lingkungan, maupun praktik politik uang. Rendahnya literasi politik, dominasi ruang gema (*echo chambers*) di media digital, serta pragmatisme ekonomi menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam partisipasi yang bersifat formalitas. Akibatnya, demokrasi berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan substansi kedaulatan rakyat yang seharusnya dibangun melalui pertimbangan rasional, keadilan, dan musyawarah (Zaman, 2023).

Kondisi tersebut berdampak serius terhadap kualitas kepemimpinan nasional dan keberlangsungan demokrasi substansial. Pemimpin yang terpilih melalui mekanisme transaksional cenderung kurang memiliki legitimasi moral dan orientasi pelayanan publik. Selain itu, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat memperlemah integritas demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mentransformasi partisipasi prosedural menjadi partisipasi bermakna melalui penguatan pendidikan politik, peningkatan literasi digital, serta revitalisasi budaya musyawarah dalam ruang publik (Sugiarti, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis manifestasi partisipasi semu dalam praktik demokrasi modern di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, mengevaluasi implikasinya terhadap kualitas kepemimpinan dan demokrasi substansial, serta merumuskan strategi transformasi menuju partisipasi politik yang lebih sadar, rasional, dan bertanggung jawab.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur primer dan sekunder, seperti

jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi pemerintah, serta artikel akademik yang relevan dengan tema demokrasi dan partisipasi politik. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena partisipasi politik masyarakat secara objektif sekaligus menganalisis faktor penyebab serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi nasional.

Pembahasan

Fenomena Partisipasi Semu dalam Lanskap Demokrasi Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia sedang mengalami tantangan besar terkait kualitas keterlibatan warga negara. Partisipasi semu memanifestasikan diri dalam bentuk tingginya antusiasme pemilih di tempat pemungutan suara (secara kuantitas), namun rendah dalam pemahaman visi-misi (secara kualitas). Fenomena ini sering disebut sebagai hollow democracy atau demokrasi kosong, di mana prosedur dijalankan tetapi substansinya hilang.

Memasuki Data menunjukkan bahwa pemilih sering kali menjatuhkan pilihan berdasarkan variabel emosional daripada rasional. Hal ini sejalan dengan pemikiran (Hidayat, 2015) yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dalam Islam seharusnya berbasis pada hikmah dan keadilan. Jika pilihan hanya didasarkan pada ikut-ikutan (*bandwagon effect*) atau tren media sosial, maka prinsip musyawarah (*syura*) yang berkualitas tidak akan tercapai. Masyarakat terjebak dalam formalitas karena ruang publik tidak lagi menjadi tempat adu gagasan, melainkan sekadar panggung tontonan politik.

Laporan terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia masih menjadi isu serius dengan tren yang mengkhawatirkan. Selama semester pertama tahun 2025, KPK menerima sebanyak 2.273 laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi. Namun, sekitar 254 laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti pada tahap verifikasi karena kekurangan data. Sementara itu, sepanjang tahun 2023, KPK mencatat 5.079 laporan pengaduan, di mana 690 laporan harus dibatalkan akibat minimnya bukti yang mendukung. Di tahun 2024, KPK menetapkan 163 individu sebagai tersangka dalam 142 kasus korupsi. Pada periode yang sama, tercatat total 1.666 kasus korupsi di Indonesia. Kasus-kasus tersebut melibatkan 1.680 pelaku laki-laki dan 155 pelaku perempuan. Di sisi lain, tingkat kepatuhan pejabat negara dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama periode 2020–2024 menunjukkan angka rata-rata yang cukup tinggi, yakni mencapai 96,67 persen (Kenneth, 2024). Namun demikian, meskipun tingkat kepatuhan administratif meningkat, penurunan jumlah kasus korupsi masih belum terlihat secara signifikan. Dengan kondisi ini, pendidikan antikorupsi berbasis nilai-nilai Pancasila tetap menjadi kebutuhan yang mendesak demi mendorong perubahan yang lebih nyata.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih kuat mengakar dalam birokrasi dan menjadi ancaman serius terhadap terwujudnya pemerintahan yang bersih dan demokratis. Pemerintah menjawab kondisi tersebut dengan menerapkan sejumlah kebijakan strategis untuk menguatkan pendidikan antikorupsi. Salah satunya melalui

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, yang menjadikan integritas sebagai satu dari lima nilai utama karakter bangsa. Selain itu, pendidikan antikorupsi juga dimasukkan ke dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN-PPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mendukung pelaksanaannya dengan menyusun modul pembelajaran antikorupsi serta memberikan pelatihan khusus bagi para pendidik di berbagai jenjang pendidikan.

Akar penyebab: Literasi, Digitalisasi dan Pragmatisme

Berdasarkan analisis deskriptif, terdapat tiga pilar utama yang menyebabkan suburnya partisipasi semu (Rahaju et al., n.d.):

Krisis Literasi Politik dan Pendidikan Kewarganegaraan

Masyarakat memiliki akses informasi yang luas, tetapi tidak memiliki kemampuan menyaring (filter) informasi tersebut. Literasi politik yang rendah menyebabkan pemilih tidak mampu membedakan antara janji kampanye yang realistis dan populisme belaka. Akibatnya, keterlibatan mereka dalam pemilu hanya menjadi penggugur kewajiban administratif sebagai warga negara.

Disrupsi Media Sosial dan Ruang Gema (Echo Chambers)

Media sosial telah mengubah perilaku politik secara drastis. Algoritma digital menciptakan lingkungan di mana individu hanya mendengar suara yang setuju dengan pendapat mereka. Hal ini menghilangkan tradisi dialektika. Partisipasi politik menjadi semu karena keputusan diambil bukan melalui kontemplasi, melainkan melalui manipulasi opini oleh influencer atau buzzer yang sering kali mengaburkan fakta objektif.

Politik Uang dan Degradasi Moralitas

Faktor ekonomi tetap menjadi pemicu utama partisipasi formalitas. Politik uang menciptakan mentalitas transaksional. Ketika "suara" dianggap sebagai komoditas yang bisa dibeli, maka keterlibatan masyarakat bukan lagi bentuk kedaulatan, melainkan bentuk kepasrahan terhadap kekuatan modal. Ini mencerminkan lemahnya etika politik yang seharusnya menjadi pondasi utama demokrasi.

Implikasi Sistemik: Tergerusnya Integritas Negara

Dampak dari partisipasi yang bersifat formalitas ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa (Paradina et al., 2026). Pertama, lahirnya Demokrasi Prosedural. Pemilu rutin dilaksanakan, namun kebijakan negara pasca-pemilu seringkali tidak mencerminkan aspirasi rakyat bawah. Hal ini terjadi karena elit terpilih merasa tidak memiliki tanggung jawab moral kepada pemilih yang suaranya didapat melalui cara-cara transaksional.

Kedua, berkurangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Merujuk pada kajian Pascasarjana UIN Malang (2023), integritas demokrasi sangat bergantung pada netralitas aparatur (ASN) dan penyelenggara. Jika masyarakat merasakan adanya keberpihakan atau manipulasi sistem, mereka akan ikut serta dalam politik hanya

sebagai formalitas karena merasa "permainan sudah diatur". Ketidaknetralan ini merusak legitimasi pemerintah di mata rakyatnya sendiri.

Strategi Transformasi Menuju Demokrasi Deliberatif

Untuk memutus rantai partisipasi semu, diperlukan transformasi menuju Demokrasi Deliberatif (Muzaqqi, 2013). Berdasarkan studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2022), model demokrasi ini mengutamakan proses diskusi publik yang jujur sebelum pengambilan keputusan. Optimalisasi Pendidikan Politik di Kampus: Mahasiswa harus didorong bukan hanya menjadi pemilih cerdas, tetapi juga penggerak literasi politik di masyarakat. Perguruan tinggi harus menjadi laboratorium demokrasi yang menghargai perbedaan pendapat dan argumen berbasis data.

Penguatan Literasi Media Digital: Negara dan institusi pendidikan perlu bekerja sama untuk memberikan edukasi literasi digital secara masif. Masyarakat harus diberdayakan agar mampu membedakan informasi berbasis data dengan propaganda politik. Menghidupkan Kembali Budaya Musyawarah: Demokrasi substansial hanya bisa dicapai jika musyawarah kembali dijadikan ruh utama. Partisipasi harus bermakna (*meaningful participation*), di mana suara rakyat didengarkan tidak hanya saat pemilu, tetapi dalam setiap tahap perencanaan kebijakan publik.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa demokrasi modern di Indonesia masih menghadapi persoalan serius berupa fenomena partisipasi politik yang cenderung bersifat formalitas. Tingginya angka keikutsertaan masyarakat dalam pemilu belum sepenuhnya menunjukkan kualitas demokrasi yang substansial, karena sebagian pemilih belum didasarkan pada pemahaman politik, kesadaran kritis, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Partisipasi semu tampak dalam perilaku memilih yang dipengaruhi popularitas kandidat, tekanan sosial, media digital, dan praktik politik uang. Faktor utama yang melatarbelakangi kondisi tersebut adalah rendahnya literasi politik, dominasi ruang gema di media sosial, serta pragmatisme ekonomi yang mendorong hubungan transaksional antara rakyat dan elite politik. Dampak dari fenomena ini ialah lahirnya demokrasi prosedural, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, melemahnya integritas pemerintahan, serta terhambatnya terwujud demokrasi yang berlandaskan keadilan dan musyawarah. Oleh karena itu, kualitas demokrasi harus diukur tidak hanya dari kuantitas partisipasi, tetapi juga dari kualitas kesadaran politik masyarakat.

Adapun saran yang dapat diajukan ialah perlunya penguatan pendidikan politik sejak dini melalui sekolah, kampus, dan masyarakat. Pemerintah bersama lembaga pendidikan perlu meningkatkan literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi secara kritis. Penegakan hukum terhadap politik uang harus diperkuat secara konsisten. Selain itu, budaya musyawarah perlu dihidupkan kembali dalam ruang publik agar masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan dan perumusan kebijakan demi terwujudnya demokrasi deliberatif yang sehat dan bermartabat.

Daftar Pustaka

- Hidayat, A. (2015). Syura dan Demokrasi dalam Perspektif al-Qur'an. *Addin*, 9(2).
- Hidayatullah, A. D. (2024). Kontribusi Sistem Pendidikan Islam terhadap Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Politik di Indonesia. *MUTIARA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 101–119. <https://repository.uin-malang.ac.id/19997/>
- Kenneth, N. (2024). Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335–340.
- Muzaqqi, F. (2013). Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia. *Jurnal Review Politik*, 3(1), 123–139.
- Paradina, N. A., Akbar, M. A., & Rijal, S. (2026). Pengaruh Partisipasi Publik Terhadap Kualitas Produk Hukum Nasional. *Jurnal USM Law Review*, 9(1), 202–215.
- Rahaju, M. E. E., Wibisono, N., & Darmoko, H. W. (n.d.). *Potret Partisipasi (Semu) Publik Sebagai Pengambilan Keputusan Representatif Dalam Penyusunan APBD*.
- Sugiarti, T. (2023). *Money Politic: Tinjauan berdasarkan partisipasi politik dan Kupertinoan Memilih Masyarakat*. Penerbit P4I. <https://repository.uin-malang.ac.id/16195/>
- Zainuddin, M., Supriyatno, T., Wahid, S., Alfa, M. A., Masruri, H., Ghony, M. D., & Ali, N. (2010). *Pendidikan Islam dari Paradigma Klasik Hingga Kontemporer*. UIN Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/235/>
- Zaman, S. (2023). *Mengatasi populisme politik: Pendekatan demokratis berbasis penyelesaian masalah dan partisipasi publik*. <https://repository.uin-malang.ac.id/14994/>